

Judul : Target 1 Juta Barel Perlu Kolaborasi
Tanggal : Selasa, 07 Desember 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Target 1 Juta Barel Perlu Kolaborasi

JAKARTA – Konsumsi energi di masa mendatang diperkirakan terus meningkat. Untuk itu, langkah strategis dalam mengamankan pasokan energi nasional diperlukan.

Saat ini dan beberapa tahun ke depan kebutuhan energi di Indonesia masih ditopang oleh bahan bakar fosil berupa minyak dan gas bumi (migas). Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22/2017 terlihat volume migas meningkat meskipun secara persentase menurun.

Berdasarkan RUEN tersebut, porsi minyak mencapai 28,8% dalam bauran energi nasional pada 2020 atau secara volume mencapai 1,66 juta barel per hari (BPH). Sementara gas bumi sebesar 6.557 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sebesar 21,2% dari bauran energi nasional.

Pada 2030 secara persentase bauran minyak diprediksi 23%, namun secara volume meningkat menjadi 2,27 juta BPH. Sementara itu, porsi gas bumi naik hampir dua kali lipat sebesar 11.728 MMSCFD atau 21,8%.

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, melihat perkiraan konsumsi energi yang terus meningkat, ketahanan energi yang merupakan kepentingan nasional itu perlu terus diupayakan bisa tercapai. Indonesia, menurutnya, perlu mengamankan pasokan energi yang tetap bergantung pada migas. "Tidak berlebihan jika target peningkatan produksi migas menjadi prioritas nasional," katanya dalam siaran persnya kemarin.

Dia berharap, seluruh pihak terkait memiliki visi yang sama yakni mengamankan kepentingan nasional tersebut. Target produksi minyak sebesar 1 juta BPH serta gas bumi sebanyak 12.000 MMSCFD pada

2030, menurut Maman, masih bisa tercapai apabila seluruh pihak berkolaborasi dalam menjalankan perannya masing-masing.

Kebutuhan migas pasca-2030 juga diperkirakan terus meningkat. Data RUEN menyebutkan, pada 2050 volume kebutuhan minyak akan mencapai 3,97 juta BPH. Sementara kebutuhan gas bumi akan meningkat menjadi 26.112 MMSCFD.

Menurut Maman, DPR berencana kembali membahas Revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas). Satu di antaranya yang direvisi adalah memastikan ada kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Saat ini mekanisme untuk mendorong kontraktor KKS melakukan eksplorasi melalui komitmen kerja pasti (KKP). Strategi pemerintah tersebut patut didukung. "KKP akan juga diatur dalam UU Migas yang baru," kata Maman.

UU Migas diharapkan juga mengatur insentif yang menumbuhkan minat kontraktor KKS dalam melakukan eksplorasi. Eksplorasi, kata dia, menjadi kunci untuk menemukan cadangan migas baru sehingga target produksi bisa tercapai.

Sebelumnya SKK Migas telah menggelar International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) pada 29 November - 1 Desember 2021. Dalam gelaran yang kedua kalinya itu, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam panel diskusi sepakat bahwa industri hulu migas harus terus tumbuh. Caranya dengan kembali menggalakan iklim investasi, mening-

katkan kolaborasi, dan mengkaji insentif yang berdampak pada peningkatan produksi.

Dalam salah satu panel IOG 2021, Managing Director Eni Indonesia, Diego Portoghese, mengungkapkan, koordinasi dengan *stakeholder* di hulu migas sangat penting. Satu di antaranya yang utama ketika mengajukan insentif yang bervariasi agar dapat diimplementasikan di proyek migas. Hal ini mengingat tidak semua kontraktor migas membutuhkan insentif yang sama. Sebaliknya pemerintah membuka dialog dengan masing-masing kontraktor migas untuk menentukan insentif yang tepat untuk diimplementasikan.

"Tujuannya agar lapangan migasnya bisa lebih menguntungkan, menarik, dan berkesinambungan," kata Diego.

Pengamat migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, peran pemerintah menjadi penting agar secara konkret menarik investor untuk bersedia eksplorasi dan eksploitasi. Dalam tataran operasional, pemerintah dituntut untuk mempercepat proses perizinan, persetujuan program-program kerja dan anggaran, serta mempercepat eksekusi program.

Sementara itu, parlemen diminta mengawal dalam membuat regulasi yang jelas, yang membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, dengan dana pemerintah yang terbatas, dana investor dibutuhkan untuk menemukan cadangan migas baru yang siap diproduksi.

Peran kontraktor KKS, kata dia, tidak hanya menjalankan operasi eksisting. Kontraktor dituntut secara proaktif memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa-apa yang mereka perlukan untuk merealisasikan investasi mereka di eksplorasi dan eksploitasi tahap lanjut di wilayah non eksisting.

Yanto Kusdiantono